



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia dan petunjukNYa sehingga Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2024 telah disusun dan dapat terselesaikan sesuai rencana guna memenuhi kewajiban perangkat daerah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dengan mengacu pada Perubahan Renstra 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari Dokumen Renja Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2019 - 2024.

Kami menyadari Dokumen ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, Kami berharap Renja ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tahun 2024.

Ambon,

2022

**Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Provinsi Maluku**

Yahya Kotta,S.Pt.,M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670527 199903 1 004



DAFTAR ISI

	HALAMAN
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian RENSTRA	5
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi	14
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perindag	19
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDAG	21
A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindag	21
B. Program dan Kegiatan	26
C. Permasalahan dan Tindak Lanjut	27
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V. PENUTUP	37
LAMPIRAN	



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku secara substansial menjabarkan visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur dan Program DISPERINDAG Provinsi Maluku mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan 2019 - 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2019 - 2024.

RENJA DISPERINDAG memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RENJA tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja DISPERINDAG untuk tahun kelima periode RENSTRA DISPERINDAG 2019-2024 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DIPERINDAG Tahun 2024 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan RENJA DIPERINDAG Tahun 2024 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024. RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut :



1. Persiapan Penyusunan RENJA
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku berpedoman pada RENSTRA DISPERINDAG Provinsi Maluku, evaluasi hasil RENJA Tahun 2022 dan evaluasi RENJA tahun 2023.
3. Pembahasan hasil Forum OPD DISPERINDAG untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
4. Perumusan Rancangan Akhir RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku.
5. Verifikasi Rancangan Akhir RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku.

B. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 - 2025;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.



- 12) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku;
- 13) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD, Dinas dan Badan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;
- 14) Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor :000.7.2-75 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024.

C. Maksud Tujuan

1. Maksud

RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun dengan maksud :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja RENSTRA dan RPJMD Provinsi Maluku pada tahun 2024.

2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DISPERINDAG tahun 2024 sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan, selain itu, RENJA DIPERINDAG akan digunakan sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku Tahun 2024 meliputi :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPRERINDAG PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA DISPERINDAG Provinsi Maluku
- 2.2. Analisis Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERINDAG Provinsi Maluku
- 2.4. Permasalahan Penyelenggaraan TUPOKSI
- 2.5. Peluang dan Tantangan DISPERINDAG

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAG PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DISPERINDAG Provinsi Maluku Tahun 2022 Capaian RENSTRA DISPERINDAG Provinsi Maluku

Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku periode 2019 - 2024, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022, dan realisasi RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 mengacu pada hasil laporan realisasi RENJA-APBD sampai dengan tahun 2022.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2022 dan capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
PROVINSI MALUKU

Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
3	Usuran Pilihan									
3 30	Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan									
3 30 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Kinerja Layanan Organisasi Perangkat Daerah (Dengan satuan : Persen)	100	98	100	97,9	97,9	100	98,6	98,6
3 30 01 1,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Dengan satuan : Jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100
3 30 01 1,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun (Dengan satuan : Dokumen)	7	7	7	7	100	7	7	100
3 30 01 1,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dalam daerah serta penyusunan laporan capaian kinerja OPD (dengan satuan : Laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
3 30 01 1,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dengan satuan : Laporan)	1	1	1	1	100	1	3	60
3 30 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kapasitas ASN (Dengan satuan : Orang)	120	105	100	100	100	85	290	241,6
3 30 01 1,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi (Dengan satuan : Orang)	120	105	100	100	100	85	290	241,6



3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat jasa layanan untuk memperlancar tugas-tugas Perkantoran (Dengan satuan : Jenis)	9	8	9	8	88,8	8	8	88,8
3	30	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik (Dengan satuan : Jenis)	8	8	8	8	100	8	8	100
3	30	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Dengan satuan : Jenis)	7	5	7	5	71,4	7	17	242,8
3	30	01	1,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Bahan Pembersih (Dengan satuan : Jenis)	20	20	20	15	75	20	15	75
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku, Laporan, dan Dokumen yang dicetak atau digandakan (Dengan satuan : Jenis)	13	11	13	11	84,6	13	11	84,6
3	30	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku, Koran, dan Peraturan Perundang-Undangan (dengan satuan : jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman dalam rangka rapat dan menjamu tamu yang berkunjung (dengan satuan : Jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah (dengan satuan : kali)	20	20	20	18	90	20	18	90
3	30	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan SKPD (Dengan satuan : Unit)	91	27	15	40	266,6	25	92	102
3	30	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler Kantor (Dengan Satuan : Unit)	60	12	10	29	290	18	59	98,3
3	30	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dengan satuan : Unit)	31	15	5	11	220	7	33	106,4
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat jasa penunjang urusan perangkat daerah (Dengan satuan : jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan meterai (Dengan satuan :	4000	750	1000	875	87,5	950	2575	64,3



3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang harus dibayar (Dengan satuan : Tagihan)	15	15	15	15	100	15	15	100
3	30	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan yang perlengkapan yang di servis (Dengan satuan : Unit)	16	18	18	18	100	18	18	112,5
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran (Dengan satuan : Orang)	24	32	24	32	133,3	32	32	133,3
3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah (Dengan satuan : jenis)	7	5	7	5	71,4	5	7	71,4
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala (Dengan satuan : Unit)	12	8	12	8	66,6	8	12	66,6
3	30	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan jabatan dan lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala (Dengan satuan : Unit)	3	1	3	1	33,3	1	3	33,3
3	30	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit kantor yang direhabilitasi (Dengan satuan : Unit)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang direhabilitasi (Dengan satuan : Unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jenis Bahan Berbahaya (Dengan satuan : jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	02	1,03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah monitoring distribusi berbahaya (Dengan satuan : Jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	02	1,03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya (Dengan satuan : Jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100



3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok (Dengan satuan : Persen)	3,4 - 5	4,19	3,5 - 4	3,8	95	3,5 4	7,73	193,2
						Cakupan Bina Kelompok Pedagang (Dalam satuan : Persen)	12	18,3	7,2	7,2	100	9,09	9,09	100
3	30	04	1,02		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tingkat kestabilan harga dan stok (Dengan satuan : jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	04	1,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan stok dan harga di pasar, gerai modern dan tingkat distributor (Dengan satuan : Kali)	60	60	60	60	100	60	60	100
3	30	04	1,02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan pasar murah, operasi pasa, koordinasi dalam rangka stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan (Dengan satuan : jenis)	5	5	5	5	100	5	5	100
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	19	13	14,3	14,82	99,93	40,5	55,32	291,1
3	30	05	1,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang, pameran dagang, dan misi dagang dalam rangka peningkatan ekspor (Dengan satuan : jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100
3	30	05	1,01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah monitoring pelaksanaan ekspor langsung, dan identifikasi potensi ekspor (Dalam satuan jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100



3	30	06			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar yang Sesuai Ketentuan (Dalam satuan : Persen)	100	46	65	70,5	108,4	79,88	196,38	100,7
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan konsumen terhadap barang yang beredar dan tertib niaga sesuai ketentuan (Dengan satuan : jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan, penyidikan dan Pembentukan BPSK (Dengan satuan : jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Hasil Perkebunan yang di uji (Dengan satuan : Komoditi)	6	-	6	6	100	6	6	100
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Komoditi Hasil Perkebunan yang di uji (Dengan satuan : Komoditi)	6	-	6	6	100	6	6	100
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan barang beredar dan/atau jasa (Dengan satuan : Persen)	100	46	65	70,5	108,4	79,88	196,38	100,7
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar dan tertib niaga (Dengan satuan : Kabupaten)	11	11	11	11	100	11	11	100
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Dalam satuan : Persen)	115,7	58,32	58,84	58,33	99,13	96,25	212,9	184,01
						Pertumbuhan Industri (Dalam satuan : Persen)	0,65	0,93	0,65	1,36	209,2	1,67	3,96	609,2
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Pengembangan Industri (Dengan satuan : Jenis)	5	5	5	5	100	5	5	100



3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri (Dengan satuan :Jenis)	1	1	1	1	100	1	-	66,6
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Dengan satuan : Komoditi)	5	1	5	1	20	1	1	60
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pengembangan outlet, pamaren lokal dan nasional, dalam rangka pemberdayaan sumber daya industri (Dengan satuan : jenis)	7	7	7	7	100	7	7	100
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana industri (Dengan satuan : unit)	10	4	1	1	100	1	6	60
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah unit usaha baru (Dengan satuan : Unit)	1.121	745	100	148	148	149	1.042	92,9



B. Analisis Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA.

Pada tabel 2.2 disajikan capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berdasarkan indikator kinerja pada RENSTRA.



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (n-3)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2020 (n-3)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Sarana Prasarana, serta Sistem Administrasi dan Pelaporan	100	100	100	100	100	98	97,9	98,6	100	100	
2.	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Cakupan Bina Kelompok Pedagang (Dengan satuan : Persen)	5	7,2	9,09	10,8	12	18,3	7,2	9,09	10,8	12	
3.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (Dengan satuan : Persen)	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	4,19	3,8	7,73	3,5 - 4	3,5 - 4	
4.	Meningkatnya nilai ekspor non migas	Nilai Ekspor Non Migas (Dengan satuan : USD Juta)	13	14,3	15,7	17,3	19	45,12	14,82	40,5	17,3	19	
5.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Persentase Barang Beredar yang Sesuai Ketentuan (Dengan satuan : Persen)	55	65	75	85	100	46	70,5	79,88	85	100	
6.	Meningkatnya cakupan bina kelompok pengrajin	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Dengan satuan : Persen)	45,26	58,84	68,50	89,05	115,7	58,32	58,33	96,25	89,05	115,7	
7.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri (Dengan satuan : Persen)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,93	1,36	1,67	0,65	0,65	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

1. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, maka perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Adapun uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- 1) Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 3) Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan dalam negeri serta perdagangan luar negeri



sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Permasalahan dan Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menemukan beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

- a. Sebagian besar program/kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tidak dapat dilaksanakan karena alokasi anggaran setiap tahun anggaran mengalami penurunan.
 - b. Pengembangan Kelapa Terpadu yang merupakan pilot project Dinas Perindag Provinsi Maluku dan Bappeda Provinsi Maluku perlu dikembangkan pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Kerana terbatasnya anggaran tahun 2022, maka diusulkan untuk Tahun 2023 penambahan arial penjumuran, pelatihan kelapa terpadu dan kemasan untuk media tanam
 - c. Khusus terkait perencanaan dan alokasi anggaran yang bersuber dari Pokok Pikiran DPRD perlu dilakukan penajaman khususnya bantuan kepada masyarakat perlu diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku periode 2019 - 2024, sehigga target-target capaian dalam RENSTRA dapat dicapai.
3. Tantangan dan Peluang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum, tantangan dan peluang pada sektor industri dan perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Sektor Industri

a) Tantangan :

- ✓ Pentingnya penggunaan teknologi yang tepat sasaran khususnya bagi IKM Maluku sehingga diharapkan dapat menekan harga produksi produk, peningkatan kualitas produk, serta memberikan efektivitas produksi.
- ✓ Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM terutama pelaku IKM agar dapat memanfaatkan peluang usaha pada era penggunaan teknologi informasi yang berkembang saat ini sehingga dapat berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu perlu adanya pendampingan bagi IKM agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi yang sudah berkembang setiap saat.
- ✓ Penyiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan investasi terutama pada sektor industri di Maluku.
- ✓ Minimnya infrastruktur pendukung di Maluku merupakan salah satu penghambat dalam peningkatan investasi saat ini. Tanpa adanya infrastruktur pendukung, permasalahan efisiensi produksi akan selalu digaungkan calon investor yang akan berinvestasi di Maluku.
- ✓ Industri yang ramah lingkungan yang berkelanjutan di era Industri 4.0

b) Peluang :

- ✓ Sebagai langkah dalam penyiapan infrastruktur dasar serta kemudahan berinvestasi, Pemerintah Daerah Maluku juga gencar mendorong pengembangan sentra IKM agar dapat segera terealisasi. Diharapkan dengan adanya sentra industri di Maluku akan menarik investor yang ingin berinvestasi di Maluku dengan menawarkan kemudahan berinvestasi dalam perwilayahan industri.
- ✓ Perkembangan era Industri 4.0 yang berkembang pesat selain menjadi tantangan juga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dalam membuka pangsa pasar baru baik dalam maupun luar negeri.

➤ Sektor Perdagangan

a) Tantangan :



- ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah pengembangan ekonomi lokal dalam rangka mencegah maraknya penggunaan produk luar negeri. Hal tersebut berlaku pada daerah perbatasan dimana dibutuhkan kebijakan khusus agar produk dalam negeri dapat terjangkau.
- ✓ Perluasan pangsa pasar khususnya produk Maluku sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi dan ekspor Maluku. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan akses pasar yang sejalan dengan peningkatan kualitas produk ekspor.
- ✓ Pola pikir eksportir yang masih menginginkan ekspor dari luar Maluku.
- ✓ Biaya Logistik di Maluku masih cukup tinggi.
- ✓ Struktur dan Prosedur birokrasi masih perlu biaya tambahan dan proses perizinan masih lambat.
- ✓ Komoditi ekspor Maluku masih berorientasi pada komoditi perikanan, perkebunan, belum menyetuh pada komoditi yang lain seperti industri kreatif, kehutanan, perikanan dan lain-lain sehingga lambat dalam peningkatan ekspor.
- ✓ Meningkatnya kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan

b) Peluang :

- ✓ Pesatnya pertumbuhan retail-retail modern baik yang berskala besar maupun kecil di Provinsi Maluku memberi ruang atau akses pasar bagi pengrajin industri kecil dan menengah (IKM) untuk menciptakan produk terbaru yang berkualitas dan berdaya saing di pasar yang tentunya memenuhi ketentuan atau persyaratan dari suatu produk yang dihasilkan.
- ✓ Perkembangan era industri 4.0 yang berkembang pesat selain menjadi tantangan juga merupakan peluang yang dapat diambil. Kemudahan bertransaksi serta hilangnya batasan wilayah menjadi peluang yang harus dimanfaatkan dalam membuka pangsa pasar baru baik dalam maupun luar negeri.
- ✓ Memasuki era teknologi industri 4.0 maka erba tantangan yang dihadapi diatas sekaligus merupakan peluang mengingat sistem komunikasi lebih



ditekankan pada teknologi berbasis digital sehingga permasalahan rendahnya kesadaran dan pemahaman konsumen dan tertib niaga dapat diatasi dengan komunikasi dan edukasi berbasis teknologi digital.

4. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2019 - 2024 sehingga evaluasi terhadap program dan kegiatan prioritas yang mendukung Visi dan Misi harus disesuaikan dengan tupoksi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISPERINDAG Provinsi Maluku menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai ekspor hasil industri pengolahan non migas, peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas, peningkatan pemantauan jenis bahan berbahaya, stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan nilai ekspor Non migas, penanganan pengaduan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga, serta komoditi potensial yang sesuai aturan.

Langkah- langkah strategis yang dilaksanakan DIPERINDAG Provinsi Maluku adalah :

- a. Peningkatan ekspor langsung, Optimalisasi Pelayanan Ekspor melalui Non Stop Service Twenty For Seven (NSS 247) yaitu inovasi dimana eksportir dapat melaksanakan ekspor selama dua puluh empat jam dalam seminggu non stop, pemanfaatan klik ekspor, dan export center.
- b. Peningkatan diversifikasi produk ekspor, tidak hanya berfokus pada ekspor hasil perikanan, tetapi komoditi potensial lainnya.
- c. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Harga dan Bapok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting, dilibatkannya satgas pangan dalam rangka pengamanan stok dan pemantauan harga secara rutin dan berkala baik di tingkat pasar tradisional maupun Distributor dalam rangka pengendalian inflasi.
- d. Peningkatan jumlah Tenaga kerja sektor industri pengolahan melalui bantuan pemberdayaan masyarakat.



- e. Terlindunginya konsumen, dengan jalan dilaksanakannya pengawasan barang beredar secara rutin/berkala.
- f. Peningkatan Pendapatan melalui UPTD Balai Sertifikasi Pengujian, Sertifikasi Mutu Barang.
- g. Optimalisasi pemanfaatan pasar ole-ole sebagai sumber pendapatan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Rewiew ini dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra). Proses yang dilakukan adalah mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal dan dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.



Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Provinsi Maluku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.	Perencanaan dan Pengembangan										
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana				76,500,000					3,500,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maluku Tengah (Wootay)	Terlaksananya Pengembangan Kelapa Terpadu	1 Unit	1,500,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Buru Selatan, dan Kab. Malra	Terlaksananya Pengembangan Kelapa Terpadu	2 Unit	3,000,000	Tahun 2022 telah dilakukan pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan Produk Kelapa Terpadu di Desa Wootay Kec. TNS. Tahun 2023 juga telah dilakukan dalam rangka pengembangan melalui Pembuatan arial penjumlahan serta Kemasan untuk media tanam
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Maluku Tengah (Ds. Ihamahu, dan Tuhaha)	Terlaksananya bantuan kemasan	2 Kelompok IKM	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Maluku Tengah (Ds. Ihamahu, dan Tuhaha)	Terlaksananya pembangunan rumah produksi	2 Kelompok IKM	500,000	Kelompok IKM Desa Ihamahu dan Tuhaha sudah difasilitasi dengan kemasan dari anggaran tahun 2022 namun yang sangat dibutuhkan adalah rumah produksi dan peralatan/tungku

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDAG

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindag

Tujuan dan Sasaran dirumuskan berdasarkan pemetaan isu dan permasalahan. Pada dasarnya tujuan dan sasaran merupakan kerangka kinerja dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku selama lima tahun ke depan yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

1. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang Industri dan Perdagangan Provinsi Maluku periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat

2. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang Industri dan Perdagangan Provinsi Maluku periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
2. Peningkatan Laju pertumbuhan Ekonomi.
3. Pengendalian inflasi

✚ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran :

- a) meningkatnya kinerja layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

✚ Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi



Berkelanjutan dengan sasaran :

- a) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan
- b) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat dengan sasaran :

- a) Pengendalian inflasi

Tabel 4.1 menunjukkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Tahun 2021-2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	DATA AWAL (2020)	PADA TAHUN KE- TARGET KINERJA SASARAN			
					2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kinerja layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Industri Pengolahan Non Migas (Dengan satuan : USD (Juta))	25	25	25	30	35
			Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Dengan Satuan : Orang)	35.719	36.433	37.162	37.905	38.663
		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan	Peningkatan Pemantauan Peredaran Barang Berbahaya (Dengan Satuan : Jenis)	2	2	2	2	2



		besar dan eceran; termasuk reparasi mobil dan sepeda motor						
			Pertumbuhan Nilai Ekspor NonMigas (Dengan Satuan : Persen)	10	10	10	10	10
			Peningkatan Penanganan Konsumen (Dengan Satuan: Laporan)	2	3	4	4	5
			Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	55	65	75	85	100



			(Dengan Satuan : Persen)						
			Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	0	6	6	6	6	
3.	Terkendalnya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Pengendalian Inflasi	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan : Persen)	3,5-4	3,5-4	3,5-4	3,5-4	3,4-4	

Sumber : Dinas Perindag Prov. Maluku



B. Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada tahun 2022 sebanyak 6 (enam) program sesuai dengan PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 yaitu (1) program penunjang urusan pemerintahan daerah, (2) program perizinan dan pendaftaran perusahaan, (3) program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting, (4) program pengembangan ekspor, (5) program standarisasi dan perlindungan konsumen, (6) program perencanaan dan pembangunan industri.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan penunjang bidang perdagangan dalam negeri, program pengembangan ekspor merupakan program yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen berfokus pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen, dan program perencanaan dan pembangunan industri berfokus pada peningkatan cakupan bina kelompok pengrajin serta pertumbuhan industri.



C. Permasalahan dan Tindak Lanjut

1. Permasalahan

Memasuki tahun kelima atau tahun terakhir pemerintahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, terdapat permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan antara lain :

- 1) Program Unggulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang mendukung Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yaitu OVOP (One Village One Product) dari tahun 2020 s/d 2021 mempunyai progres yang sangat kecil, karena pada tahun 2020 anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembangunan Rumah Produksi Tenun Ikat di Kab. KKT dan Bantuan Benang dan Zat Pewarna Tenun Ikat di Kab. KKT, MBD, dan Kota Ambon, serta Bantuan Kemasan Ikan Julung di Kab. SBT mengalami rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan yang terealisasi hanya bantuan Benang dan Zat Pewarna Tenun Ikat di Kota Ambon dan bantuan kemasan ikan julung di Kab. SBT. Sedangkan pada tahun anggaran 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku hanya menganggarkan bantuan Benang dan Zat Pewarna Tenun Ikat di Kab. MBD, mengingat terbatasnya alokasi anggaran murni dinas.
- 2) Penyusunan Perencanaan Tahun 2021 mengalami perubahan Numinklatur, yaitu Permendagri 13 Tahun 2006 diganti dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang mengakibatkan



terjadinya perubahan pada numiklatur program dan kegiatan yang tidak sejalan dengan program dan kegiatan yang telah di susun dalam Rencana Strategis Dinas (RENSTRA) tahun 2019 - 2024 serta capaian indikator kinerja dinas.

- 3) Perlu adanya perhatian serius dari Bappeda terhadap usulan pokok pikiran DPRD Provinsi Maluku, karena sebagian besar usulan yang disampaikan tidak mendukung RENSTRA dan Capaian Dinas serta tidak tepat sasaran.
- 4) Alokasi anggaran murni dinas setiap tahun menurun dan sebagian besar adalah anggaran pokok pikiran DPRD, Hibah Dekranasda dan kegiatan PKK Provinsi Maluku sehingga program/kegiatan prioritas dinas tidak dapat ditampung.

2. Tindak Lanjut

Menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Maluku, yaitu :

- 1) Usulan Program/Kegiatan Unggulan yang mendukung Program Unggulan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta usulan prioritas dinas harus diperhatikan.
- 2) Pada saat memverifikasi Pokok Pikiran DPRD Provinsi Maluku, mohon agar yang tidak sesuai dengan TUPOKSI harus segera diarahkan untuk menampung di OPD lain sesuai Tugas dan Fungsi.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2024 akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pihak di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di Maluku. Secara umum pengembangan sektor industri dan perdagangan akan dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk unggulan daerah, promosi melalui pameran lokal, nasional maupun internasional, peningkatan komoditi ekspor serta pengendalian inflasi, dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku merencanakan 6 program, 14 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dengan rencana pendanaan sebesar Rp. 45.984.961.944,-. Secara ringkas rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI MALUKU**

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PILIHAN				45,984,961,944				48,284,210,041
3 31	Perindustrian				45,984,961,944				48,284,210,041
3 31 3 31 00 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				45,984,961,944				48,284,210,041
3 30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				25,874,124,000				27,167,830,200
	Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik				17,900,000,000				18,695,000,000
3 30 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Implemetasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	100%		17,900,000,000				18,695,000,000
3 30 01 1.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Tingkat perencanaan, evaluasi dan	3 Jenis		1,275,000,000				1,338,750,000
3 30 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi	7 Dok	675,000,000	APBD		7 Dok	708,750,000
3 30 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Laporan hasil koordinasi dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	11 Kab/Kota	12 Laporan	300,000,000	APBD		12 Laporan	315,000,000
3 30 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	9 Kab/Kota	1 Laporan	300,000,000	APBD		1 Laporan	315,000,000



3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelaksanaan keuangan SKPD	1 Unit		9,150,000,000				9,607,500,000
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN OPD	Provinsi	51 orang	9,000,000,000	APBD		51 orang	9,450,000,000
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan OPD	Provinsi	12 orang	150,000,000	APBD		12 orang	157,500,000
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kapasitas ASN	55 orang		375,000,000				393,750,000
3	30	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan pakaian olahraga hari-hari tertentu	Provinsi	2 Jenis	75,000,000	APBD		2 Jenis	78,750,000
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat tugas dan fungsi	Luar Daerah	5 Orang	100,000,000	APBD		5 Orang	105,000,000
3	240	01	1.05	10	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	Provinsi	55 Orang	100,000,000	APBD		55 Orang	105,000,000
3	270	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Provinsi	5 orang	100,000,000	APBD		5 orang	105,000,000
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat jasa layanan untuk memperlancar tugas-tugas Perkantoran	7 jenis		1,190,000,000				1,249,500,000
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen penerangan bangunan kantor yang	Provinsi	1 Paket	50,000,000	APBD		1 Paket	52,500,000
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Provinsi	1 Paket	400,000,000	APBD		1 Paket	420,000,000
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi	1 Paket	80,000,000	APBD		1 Paket	84,000,000
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	Provinsi	3 Dokumen	10,000,000	APBD		3 Dokumen	10,500,000



3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Provinsi	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	105,000,000
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah, Kab/Kota	15 Laporan	400,000,000	APBD		15 Laporan	420,000,000
3	30	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi Dinas	Provinsi	6 Inovasi	150,000,000	APBD		6 Inovasi	157,500,000
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan perangkat daerah			2,465,000,000				2,488,250,000
3	30	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	Provinsi	5 Unit	1,900,000,000	APBD		5 Unit	1,995,000,000
3	30	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional	Provinsi	4 Unit	115,000,000	APBD		4 Unit	120,750,000
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel	Provinsi	10 Unit	250,000,000	APBD		10 Unit	162,500,000
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	5 Unit	200,000,000	APBD		5 Unit	210,000,000
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat jasa penunjang urusan perangkat daerah			1,745,000,000				1,832,250,000
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	21,000,000
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Provinsi	1 Laporan	650,000,000	APBD		1 Laporan	682,500,000
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	1 Laporan	75,000,000	APBD		1 Laporan	78,750,000
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	Provinsi	1 Laporan	1,000,000,000	APBD		1 Laporan	1,050,000,000



3	30	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah penunjang urusan			1,700,000,000				1,785,000,000
3	30	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi	8 Unit	200,000,000	APBD		8 Unit	210,000,000
3	30	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi	1 Unit	150,000,000	APBD		1 Unit	157,500,000
3	30	01	1.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor, Pasar Ole-ole, Bisnis Center dan Laboratorium BSMB	Provinsi	4 Jenis	950,000,000	APBD		4 Jenis	997,500,000
3	30	01	1.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Pemeliharaan Gedung Kantor, Gedung DEKANASDA	Provinsi	2 Unit	400,000,000	APBD		2 Unit	420,000,000
III.						Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis, dan Berbudaya Yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi				7,974,124,000				-
3	30	02				Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan dan pendaftaran Perusahaan Bahan Berbahaya			150,000,000				-
3	30	02	1.03			Pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya, pengecer terdaftar	Tingkat pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar			150,000,000				-
3	30	02	1.03	02		Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya	Buru, Malra, Malteng, SBB, Aru, KKT, Buru	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	157,500,000
3	30	04				Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat kestabilan harga dan stok			6,100,000,000				6,405,000,000



3	30	04	1.02		Pengendalian harga informasi, ketersediaan stok Bapok dan Bapokting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota yang terintegrasi dalam informasi	Stabilisasi Harga dan Stok Bapok dan Bapokting			6,100,000,000			6,405,000,000
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring stok dan harga di tingkat pedagang dan Distributor	Kota Ambon	1 Laporan	100,000,000	APBD	1 Laporan	105,000,000
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah pelaksanaan monitoring stok dan harga, operasi pasar, koordinasi dalam rangka stabilisasi harga menjelang HBKN, Pasar Murah dan bantuan sarana perdagangan	Provinsi, Jawa Timur, Makassar, Jakarta, SBB, SBT, Malra, Aru, Ambon, Tual	6 Laporan	6,000,000,000	APBD	6 Laporan	6,300,000,000
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Komoditi Ekspor dan Perluasan Pasar Ekspor			824,124,000			900,000,000
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah				824,124,000			900,000,000
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pameran produk ekspor, dan TEI, dan Pameran Luar Negeri	Luar Daerah	1 Paket	500,000,000	APBD	1 Paket	525,000,000
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekspor, Monitoring Pelaksanaan Ekspor Langsung, Pendampingan kepada Eksporthir dan Calon Eksporthir, Koordinasi Peningkatan Ekspor, dan Identifikasi	Provinsi, Kota Ambon, Malteng, Malra, Tual, Aru	19 Eksporthir	324,124,000	APBD	19 Eksporthir	375,000,000



3	30	06				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap Barang Beredar dan			900,000,000					-	
3	30	06	1.01			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap barang yang beredar dan tertib niaga sesuai ketentuan			400,000,000						-
3	30	06	1.01	01		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah BPSK	Ambon	1 Unit	400,000,000	APBD		1 Unit		425,000,000	
3	30	06	1.03			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan barang beredar/jasa			500,000,000						-
3	30	06	1.03	01		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar, pengawasan dan sosialisasi aplikasi berbasis anroid	Ambon, Malteng, SBB, SBT, Buru, Bursel, Aru, MTB, MBD, Tual dan Malra	12 Laporan	500,000,000	APBD		12 Laporan		525,000,000	
3	31					Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				20,110,837,944					21,175,000,000	
						Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik				6,110,837,944					6,475,000,000	
3	31	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian keuangan			6,110,837,944					6,475,000,000	
3	31	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelaksanaan keuangan SKPD			6,110,837,944					6,475,000,000	
3	31	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Provinsi	12 Bulan	6,110,837,944	APBD		12 Bulan		6,475,000,000	



II.					Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan				14,000,000,000			14,700,000,000
3	31	02			Perencanaan dan Pengembangan Industri	Pengembangan Perencanaan dan Pengembangan			14,000,000,000			14,700,000,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pengembangan, pemberdayaan industri dan masyarakat			14,000,000,000			14,700,000,000
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah pengembangan kelapa terpadu,, Pengolahan Pangan Lokal	Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Bursel, Aru, MBD, SBB	7 Dokumen	2,000,000,000	APBD	7 Dokumen	2,100,000,000
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pengembangan DEKRANASDA, Pameran, (Inacraft, Maju Indonesia, Lokal),Oulet Bandara Pattimura, Pengembangan OVOP, Pelatihan Anyaman Bambu, Pelatihan Anyaman Daun Koli	Provinsi, Luar Daerah, SBB, dan MBD	8 Dokumen	4,500,000,000	APBD	8 Dokumen	4,725,000,000
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah bantuan peralatan industri	Ambon, Malteng, SBB, SBT, Buru, Bursel, Aru, MTB, MBD, Tual dan	11 Dokumen	7,500,000,000	APBD	11 Dokumen	7,875,000,000
								J U M L A H	45,984,961,944			48,284,210,041



BAB V **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai RENSTRA DIPERINDAG periode 2019-2024 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tahun anggaran 2024.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tahun 2022, sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 - 2024.

Komitmen dan dukungan ASN DISPERINDAG Provinsi Maluku sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun dalam RENJA DISPERINDAG tahun 2024.

Ambon, 23 Maret 2023

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku,

YAHYA KOTTA, S.Pt, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 196705271999031004

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja pada tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun Berjalannya dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Daerah Tahun 2019 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
							I		II		III		IV								12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5x100 %	16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5x100 %	16	17										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	3		Urusan Pilihan		23,777,971,818	16,841,240,195	2,426,168,416	1,788,468,020	6,584,672,212	-	5,467,269,277	16,428,698,810	100	97,5	40,206,670,628											
I.	3	30	01			7,118,432,063	3,727,708,195	1,069,758,816	365,036,020	1,186,677,062	925,514,927	3,709,107,710	100	71.31	10,827,539,773											
	3	30	01	1.01		1,302,566,250	1,079,630,115	596,995,000	22,100,000	294,738,115	-	1,075,954,000	100	99,6	2,378,520,250											
	3	30	01	1.01	01	6 Dokumen	773,966,250	7 Dok	691,956,115	3 Dok	392,445,000	-	2 Dok	230,538,115	2 Dok	65,546,885	7 Dok	688,530,000	100	99,5	1,462,496,250	Disperindag Promal				
	3	30	01	1.01	06	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	274,890,000	12 Lap	227,574,000	4 Lap	77,700,000	1 Lap	12,200,000	3 Lap	45,890,000	3 Lap	91,784,000	12 Lap	227,574,000	100	100	502,464,000	Disperindag Promal			
	3	30	01	1.01	07	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	253,710,000	8 Lap	160,100,000	5 Lap	126,850,000	1 Lap	9,900,000	1 Lap	18,310,000	1 Lap	4,790,000	8 Laporan	159,850,000	100	99,8	413,560,000	Disperindag Promal			
	3	30	01	1.05		146,999,600	32,950,000	-	20,950,000	-	12,000,000	-	32,950,000	-	100	179,949,600										
	3	30	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	146,999,600	85 orang	32,950,000	-	84	20,950,000	-	1 org	12,000,000	85 Orang	32,950,000	100	100	179,949,600	Disperindag Promal					
	3	30	01	1.06		1,261,149,862	587,410,000	208,351,604	75,105,500	129,360,100	172,819,872	585,637,076	100	99,7	1,846,786,938											
	3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39,833,100	1 Paket	10,000,000	1 Pkt	5,067,000	1 Pkt	1,813,000	1 Pkt	1,169,000	1 Pkt	1,913,000	1 Paket	9,962,000	100	99,6	49,795,100	Disperindag Promal			
	3	30	01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	470,520,836	1 Paket	166,300,000	1 Pkt	46,510,000	1 Pkt	27,605,000	1 Pkt	71,720,000	1 Pkt	20,018,500	1 Paket	165,853,500	100	99,7	636,374,336	Disperindag Promal			
	3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	162,207,701	1 Paket	50,000,000	1 Pkt	19,026,805	1 Pkt	5,283,000	1 Pkt	15,680,100	1 Pkt	9,956,950	1 Paket	49,946,855	100	99,8	212,154,556	Disperindag Promal			
	3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,670,000	3 Dokumen	6,000,000	3 Dok	2,180,000	3 Dok	2,693,000	-	-	3 Dokumen	4,873,000	100	81,2	16,543,000	Disperindag Promal					
	3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	129,799,325	1 Laporan	123,225,000	1 Lap	13,997,799	1 Lap	9,461,500	1 Lap	12,125,000	1 Lap	87,535,422	1 Laporan	123,119,721	100	99,9	252,919,046	Disperindag Promal			
	3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447,118,900	13 Laporan	231,885,000	7 Lap	121,570,000	1 Lap	28,250,000	2 Lap	28,666,000	3 Lap	53,396,000	13 Laporan	231,882,000	100	99,9	679,000,900	Disperindag Promal			

	3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah pasar murah, monitoring stok dan harga pemantapan distribusi, serta bantuan sarana perdagangan			8 Laporan	4,187,100,340	9 Laporan	3,243,182,000	3 Lap	99,288,800	2 Lap	805,700,000	1 Lap	327,258,200	3 Lap	2,009,475,000	9 Laporan	3,241,722,000	100	99,9	7,428,822,340		Disperindag Promal
IV.	3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Konoditi Ekspor dan Perluasan Pasar Ekspor				590,460,750		324,124,000		67,267,000		32,532,000		56,626,000		167,270,000		323,695,000	100	99,8	914,155,750		
	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Promosi dagang, perluasan pasar ekspor dan penambahan komoditi ekspor				590,460,750		324,124,000		67,267,000		32,532,000		56,626,000		167,270,000		323,695,000	100	99,8	914,155,750		
	3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekspor, Rapat Tim Pengembangan Ekspor, Monitoring pelaksanaan Ekspor, serta identifikasi komoditi ekspor			15 Eksportir	590,460,750	19 Eksportir	324,124,000	19 Eksportir	67,267,000	19 Eksportir	32,532,000	19 Eksportir	56,626,000	19 Eksportir	167,270,000	19 Eksportir	323,695,000	100	99,8	914,155,750		Disperindag Promal
V.	3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase perlindungan konsumen terhadap barang beredar yang sesuai dengan ketentuan				512,582,000		351,564,000		108,943,000		39,400,000		54,834,000		147,933,800		351,110,800	100	99,8	863,692,800		
	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyidikan dan Hakornas				87,904,000		87,904,000		36,349,000		-		34,485,000		17,000,000		87,834,000	100	99,9	175,738,000		
	3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan, penyidikan dan HAKORNAS			1 BPSK	87,904,000	1 BPSK	87,904,000	1 BPSK	36,349,000	-	-	1 BPSK	34,485,000	1 BPSK	17,000,000	1 BPSK	87,834,000	100	99,9	175,738,000		Disperindag Promal
	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan barang beredar dan/atau jasa				424,678,000		263,660,000		72,594,000		39,400,000		20,349,000		130,933,800		263,276,800	100	99,8	687,954,800		
	3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar dan tertib niaga			3 Laporan	424,678,000	13 Laporan	263,660,000	4 Laporan	72,594,000	2 Laporan	39,400,000	1 Lap	20,349,000	6 Lap	130,933,800	13 Laporan	263,276,800	100	99,8	687,954,800		Disperindag Promal
VI.	3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Perencanaan Pembangunan Industri				11,188,196,665		9,126,432,000		1,028,338,800		545,800,000		4,959,276,950		2,201,525,550		8,734,941,300	100	95,7	19,923,137,965		
	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pengembangan, Pemberdayaan industri dan masyarakat				11,188,196,665		9,126,432,000		1,028,338,800		545,800,000		4,959,276,950		2,201,525,550		8,734,941,300	100	95,7	19,923,137,965		
	3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM Penerima Bantuan Peralatan Kelapa Terpadu dan Anyaman			13 Dok	348,459,750	17 Dok	1,936,894,000	5 Dok	113,118,000	2 Dok	25,800,000	8 Dok	1,047,715,750	2 Dok	739,416,750	17 Dok	1,926,050,500	100	99,4	2,274,510,250		Disperindag Promal
	3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi, pengembangan outlet dan DEKRANASDA Maluku			5 Dokumen	2,878,665,300	5 Dokumen	3,174,538,000	2 Dok	876,625,000	-	-	2 Dok	1,216,744,000	1 Dok	1,076,466,000	3 Jenis	3,169,825,000	100	99,8	6,048,490,300		Disperindag Promal

	3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Penerima Bantuan			264 ikm	7,961,071,615	4 Dok	4,015,000,000	1 Dokumen	38,595,800	1 Dok	520,000,000	1 Dok	2,694,817,200	1 Dok	385,652,800	4 Dokumen	3,639,065,800	100	90,6	11,600,137,415		Disperindag Promal
J U M L A H											23,777,971,818		16,841,240,195		2,426,168,416		1,788,468,020		6,584,672,212		5,467,269,277		16,428,698,810	100	97,5	40,206,670,628		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Realisasi Pelaksanaan program/kegiatan harus berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Terjadi rasionalisasi anggaran menyebabkan rendahnya realisasi anggaran

Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : PPTK perlu memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan per bulan dan berkoordinasi dengan bendahara agar realisasi anggaran meningkat

Yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Khusus bagi PPK dan PPTK harus berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mempecepat proses pekerjaan

Ambon, 18 Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku,

YAHYA KOTTA, S.Pt, M.Si
NIP. 19670527 199903 1 004

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/DTAHUN 2023
PROVINSI MALUKU**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)				
3	Urusan Pilihan													
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas, SDM Aparatur, Sarana Prasarana, serta Sistem Administrasi dan Pelaporan (Dengan Satuan : Persen)	100	97,9	100	98,6	98,6	100	296,5	296,5		
3	30	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Dengan satuan : Jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun (Dengan satuan : Dokumen)	7	7	7	7	100	7	7	100
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dalam daerah serta penyusunan laporan capaian kinerja OPD (dengan satuan : Laporan)	12	12	12	12	100	12	12	100
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dengan satuan : Laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
3	30	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kapasitas ASN (Dengan satuan : Orang)	120	100	100	85	100	85	290	241,6	
3	30	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi (Dengan satuan : Orang)	120	105	100	100	85	290	241,6	
3	30	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat jasa layanan untuk memperlancar tugas-tugas Perkantoran (Dengan satuan : Jenis)	9	8	9	8	88,8	8	8	88,8	

3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik (Dengan satuan : Jenis)	8	8	8	8	100	8	8	100
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Dengan satuan : Jenis)	7	5	7	5	71,4	7	17	242,8
3	30	01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Bahan Pembersih (Dengan satuan : Jenis)	20	20	20	15	75	20	15	75
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku, Laporan, dan Dokumen yang dicetak atau digandakan (Dengan satuan : Jenis)	13	11	13	11	84,6	13	11	84,6
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Buku, Koran, dan Peraturan Perundang-Undangan (dengan satuan : jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman dalam rangka rapat dan menjamu tamu yang berkunjung (dengan satuan : Jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah (dengan satuan : kali)	20	20	20	18	90	20	18	90
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan SKPD (Dengan satuan : Unit)	91	27	15	40	266,6	25	92	102
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor (Dengan Satuan : Unit)	60	12	10	29	290	18	59	98,3
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dengan satuan : Unit)	31	15	5	11	220	7	33	106,4
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat jasa penunjang urusan perangkat daerah (Dengan satuan : jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan meterai (Dengan satuan : Lembar)	4000	750	1000	875	87,5	950	2575	64,3
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang harus dibayar (Dengan satuan : Tagihan)	15	15	15	15	100	15	15	100
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan yang perlengkapan yang di servis (Dengan satuan : Unit)	16	18	18	18	100	18	18	112,5

3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran (Dengan satuan : Orang)	24	32	24	32	133,3	32	32	133,3
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah (Dengan satuan : jenis)	7	5	7	5	71,4	5	7	71,4
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala (Dengan satuan : Unit)	12	8	12	8	66,6	8	12	66,6
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan jabatan dan lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala (Dengan satuan : Unit)	3	1	3	1	33,3	1	3	33,3
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit kantor yang direhabilitasi (Dengan satuan : Unit)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang direhabilitasi (Dengan satuan : Unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jenis Bahan Berbahaya (Dengan satuan : jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah monitoring distribusi berbahaya (Dengan satuan : Jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya (Dengan satuan : Jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok (Dengan satuan : Persen)	3,4 - 5	4,19	3,5 - 4	3,8	95	3,5 4	7,73	193,2
						Cakupan Bina Kelompok Pedagang (Dalam satuan : Persen)	12	18,3	7,2	7,2	100	9,09	9,09	100

3	30	04	1.02		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tingkat kestabilan harga dan stok (Dengan satuan : jenis)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan stok dan harga di pasar, gerai modern dan tingkat distributor (Dengan satuan : Kali)	60	60	60	60	100	60	60	100
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan pasar murah, operasi pasa, koordinasi dalam rangka stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan (Dengan satuan : jenis)	5	5	5	5	100	5	5	100
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	19	13	14,3	14,82	99,93	40,5	55,32	291,1
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang, pameran dagang, dan misi dagang dalam rangka peningkatan ekspor (Dengan satuan : jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah monitoring pelaksanaan ekspor langsung, dan identifikasi potensi ekspor (Dalam satuan jenis)	4	4	4	4	100	4	4	100
3	30	06			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar yang Sesuai Ketentuan (Dalam satuan : Persen)	100	46	65	70,5	108,4	79,88	196,38	100,7
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan konsumen terhadap barang yang beredar dan tertib niaga sesuai ketentuan (Dengan satuan : jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100

3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan, penyidikan dan Pembentukan BPSK (Dengan satuan : jenis)	3	3	3	3	100	3	3	100
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Hasil Perkebunan yang di uji (Dengan satuan : Komoditi)	6	-	6	6	100	6	6	100
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Komoditi Hasil Perkebunan yang di uji (Dengan satuan : Komoditi)	6	-	6	6	100	6	6	100
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan barang beredar dan/atau jasa (Dengan satuan : Persen)	100	46	65	70,5	108,4	79,88	196,38	100,7
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar dan tertib niaga (Dengan satuan : Kabupaten)	11	11	11	11	100	11	11	100
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Dalam satuan : Persen)	115,7	58,32	58,84	58,33	99,13	96,25	212,9	184,01
						Pertumbuhan Industri (Dalam satuan : Persen)	0,65	0,93	0,65	1,36	209,2	1,67	3,96	609,2
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Pengembangan Industri (Dengan satuan : Jenis)	5	5	5	5	100	5	5	100
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri (Dengan satuan :Jenis)	1	1	1	1	100	1	-	66,6
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (Dengan satuan : Komoditi)	5	1	5	1	20	1	1	60
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pengembangan outlet, pamaren lokal dan nasional, dalam rangka pemberdayaan sumber daya industri (Dengan satuan : jenis)	7	7	7	7	100	7	7	100

3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pengembangan sarana dan prasarana industri (Dengan satuan : unit)	10	4	1	1	100	1	6	60
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah unit usaha baru (Dengan satuan : Unit)	1.121	745	100	148	148	149	1.042	92,9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020 (n-3)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2020 (n-3)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Sarana Prasarana, serta Sistem Administrasi dan Pelaporan	100	100	100	100	100	98	97,9	98,6	100	100	
2.	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang	Cakupan Bina Kelompok Pedagang (Dengan satuan : Persen)	5	7,2	9,09	10,8	12	18,3	7,2	9,09	10,8	12	
3.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (Dengan satuan : Persen)	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	3,5 - 4	4,19	3,8	7,73	3,5 - 4	3,5 - 4	
4.	Meningkatnya nilai ekspor non migas	Nilai Ekspor Non Migas (Dengan satuan : USD Juta)	13	14,3	15,7	17,3	19	45,12	14,82	40,5	17,3	19	
5.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Persentase Barang Beredar yang Sesuai Ketentuan (Dengan satuan : Persen)	55	65	75	85	100	46	70,5	79,88	85	100	
6.	Meningkatnya cakupan bina kelompok pengrajin	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Dengan satuan : Persen)	45,26	58,84	68,50	89,05	115,7	58,32	58,33	96,25	89,05	115,7	
7.	Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri (Dengan satuan : Persen)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,93	1,36	1,67	0,65	0,65	

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Maluku

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.	Perencanaan dan Pengembangan										
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana				76,500,000					3,500,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maluku Tengah (Wootay)	Terlaksananya Pengembangan Kelapa Terpadu	1 Unit	1,500,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Buru Selatan, dan Kab. Malra	Terlaksananya Pengembangan Kelapa Terpadu	2 Unit	3,000,000	Tahun 2022 telah dilakukan pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan Produk Kelapa Terpadu di Desa Wootay Kec. TNS. Tahun 2023 juga telah dilakukan dalam rangka pengembangan melalui Pembuatan arial penjumlahan serta Kemasan untuk media tanam
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Maluku Tengah (Ds. Ihamahu, dan Tuhaha)	Terlaksananya bantuan kemasan	2 Kelompok IKM	75,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Maluku Tengah (Ds. Ihamahu, dan Tuhaha)	Terlaksananya pembangunan rumah produksi	2 Kelompok IKM	500,000	Kelompok IKM Desa Ihamahu dan Tuhaha sudah difasilitasi dengan kemasan dari anggaran tahun 2022 namun yang sangat dibutuhkan adalah rumah produksi dan peralatan/tungku

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI MALUKU**

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PILIHAN				45,984,961,944				48,284,210,041
3 31	Perindustrian				45,984,961,944				48,284,210,041
3 31 3 31 00 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				45,984,961,944				48,284,210,041
3 30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				25,874,124,000				27,167,830,200
	Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik				17,900,000,000				18,695,000,000
3 30 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Implemetasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	100%		17,900,000,000				18,695,000,000
3 30 01 1.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	3 Jenis		1,275,000,000				1,338,750,000
3 30 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi	7 Dok	675,000,000	APBD		7 Dok	708,750,000
3 30 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Laporan hasil koordinasi dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	11 Kab/Kota	12 Laporan	300,000,000	APBD		12 Laporan	315,000,000
3 30 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	9 Kab/Kota	1 Laporan	300,000,000	APBD		1 Laporan	315,000,000
3 30 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelaksanaan keuangan SKPD	1 Unit		9,150,000,000				9,607,500,000
3 30 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN OPD	Provinsi	51 orang	9,000,000,000	APBD		51 orang	9,450,000,000
3 30 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan OPD	Provinsi	12 orang	150,000,000	APBD		12 orang	157,500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kapasitas ASN	55 orang		375,000,000			393,750,000	
3	30	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan pakian olahraga hari-hari tertentu	Provinsi	2 Jenis	75,000,000	APBD		2 Jenis	78,750,000
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat tugas dan fungsi	Luar Daerah	5 Orang	100,000,000	APBD		5 Orang	105,000,000
3	240	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	Provinsi	55 Orang	100,000,000	APBD		55 Orang	105,000,000
3	270	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Provinsi	5 orang	100,000,000	APBD		5 orang	105,000,000
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat jasa layanan untuk memperlancar tugas-tugas Perkantoran	7 jenis		1,190,000,000				1,249,500,000
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen penerangan bangunan kantor yang disediakan	Provinsi	1 Paket	50,000,000	APBD		1 Paket	52,500,000
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Provinsi	1 Paket	400,000,000	APBD		1 Paket	420,000,000
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi	1 Paket	80,000,000	APBD		1 Paket	84,000,000
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi	3 Dokumen	10,000,000	APBD		3 Dokumen	10,500,000
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Provinsi	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	105,000,000
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah, Kab/Kota	15 Laporan	400,000,000	APBD		15 Laporan	420,000,000
3	30	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi Dinas	Provinsi	6 Inovasi	150,000,000	APBD		6 Inovasi	157,500,000
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan perangkat daerah			2,465,000,000				2,488,250,000
3	30	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	Provinsi	5 Unit	1,900,000,000	APBD		5 Unit	1,995,000,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	01	1.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional	Provinsi	4 Unit	115,000,000	APBD		4 Unit	120,750,000
3	30	01	1.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel	Provinsi	10 Unit	250,000,000	APBD		10 Unit	162,500,000
3	30	01	1.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	5 Unit	200,000,000	APBD		5 Unit	210,000,000
3	30	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat jasa penunjang urusan perangkat daerah			1,745,000,000				1,832,250,000
3	30	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	21,000,000
3	30	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Provinsi	1 Laporan	650,000,000	APBD		1 Laporan	682,500,000
3	30	01	1.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	1 Laporan	75,000,000	APBD		1 Laporan	78,750,000
3	30	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Provinsi	1 Laporan	1,000,000,000	APBD		1 Laporan	1,050,000,000
3	30	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah			1,700,000,000				1,785,000,000
3	30	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi	8 Unit	200,000,000	APBD		8 Unit	210,000,000
3	30	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi	1 Unit	150,000,000	APBD		1 Unit	157,500,000
3	30	01	1.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor, Pasar Ole-ole, Bisnis Center dan Laboratorium BSMB	Provinsi	4 Jenis	950,000,000	APBD		4 Jenis	997,500,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	01	1.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Pemeliharaan Gedung Kantor, Gedung DEKANASDA	Provinsi	2 Unit	400,000,000	APBD		2 Unit	420,000,000
III.						Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis, dan Berbudaya Yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi dan Pariwisata				7,974,124,000				-
3	30	02				Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan dan pendaftaran Perusahaan Bahan Berbahaya			150,000,000				-
3	30	02	1.03			Pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya, pengecer terdaftar	Tingkat pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar			150,000,000				-
3	30	02	1.03	02		Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya	Buru, Malra, Malteng, SBB,Aru, KKT , Buru	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	157,500,000
3	30	04				Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat kestabilan harga dan stok			6,100,000,000				6,405,000,000
3	30	04	1.02			Pengendalian harga informasi, ketersediaan stok Bapak dan Bapakting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota yang terintegrasi dalam informasi perdagangan	Stabilisasi Harga dan Stok Bapak dan Bapakting			6,100,000,000				6,405,000,000
3	30	04	1.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring stok dan harga di tingkat pedagang dan Distributor	Kota Ambon	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	105,000,000
3	30	04	1.02	02		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah pelaksanaan monitoring stok dan harga, operasi pasar, koordinasi dalam rangka stabilisasi harga menjelang HBKN, Pasar Murah dan bantuan sarana perdagangan	Provinsi, Jawa Timur, Makassar, Jakarta, SBB, SBT, Malra, Aru, Ambon, Tual	6 Laporan	6,000,000,000	APBD		6 Laporan	6,300,000,000
3	30	05				Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Komoditi Ekspor dan Perluasan Pasar Ekspor			824,124,000				900,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota			824,124,000				900,000,000	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pameran produk ekspor, dan TEI, dan Pameran Luar Negeri	Luar Daerah	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	525,000,000
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekspor, Monitoring Pelaksanaan Ekspor Langsung, Pendampingan kepada Eksportir dan Calon Eksportir, Koordinasi Peningkatan Ekspor, dan Identifikasi Potensi Ekspor	Provinsi, Kota Ambon, Malteng, Malra, Tual, Aru	19 Eksportir	324,124,000	APBD		19 Eksportir	375,000,000
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap Barang Beredar dan			900,000,000				-
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap barang yang beredar dan tertib niaga sesuai ketentuan			400,000,000				-
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah BPSK	Ambon	1 Unit	400,000,000	APBD		1 Unit	425,000,000
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengawasan barang beredar/jasa			500,000,000				-
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar, pengawasan dan sosialisasi aplikasi berbasis anroid	Ambon, Malteng, SBB, SBT, Buru, Bursel, Aru, MTB, MBD, Tual dan Malra	12 Laporan	500,000,000	APBD		12 Laporan	525,000,000
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				20,110,837,944				21,175,000,000
					Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik				6,110,837,944				6,475,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian keuangan			6,110,837,944				6,475,000,000
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelaksanaan keuangan SKPD			6,110,837,944				6,475,000,000
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	12 Bulan	6,110,837,944	APBD		12 Bulan	6,475,000,000
II.					Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan				14,000,000,000				14,700,000,000
3	31	02			Perencanaan dan Pengembangan Industri	Pengembangan Perencanaan dan Pengembangan Industri			14,000,000,000				14,700,000,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pengembangan, pemberdayaan industri dan masyarakat			14,000,000,000				14,700,000,000
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah pengembangan kelapa terpadu,, Pengolahan Pangan Lokal	Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Bursel, Aru, MBD, SBB	7 Dokumen	2,000,000,000	APBD		7 Dokumen	2,100,000,000
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pengembangan DEKRANASDA, Pameran, (Inacraft, Maju Indonesia, Lokal),Oulet Bandara Pattimura, Pengembangan OVOP, Pelatihan Anyaman Bambu, Pelatihan Anyaman Daun Koli	Provinsi, Luar Daerah, SBB, dan MBD	8 Dokumen	4,500,000,000	APBD		8 Dokumen	4,725,000,000
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah bantuan peralatan industri	Ambon, Malteng, SBB, SBT, Buru, Bursel, Aru, MTB, MBD, Tual dan Malra	11 Dokumen	7,500,000,000	APBD		11 Dokumen	7,875,000,000
								JUMLAH	45,984,961,944				48,284,210,041

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI MALUKU**

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PILIHAN				45,984,961,944				48,284,210,041
3 31	Perindustrian				45,984,961,944				48,284,210,041
3 31 3 31 00 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				45,984,961,944				48,284,210,041
3 30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				25,874,124,000				27,167,830,200
	Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik				17,900,000,000				18,695,000,000
3 30 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Implemetasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	100%		17,900,000,000				18,695,000,000
3 30 01 1.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	3 Jenis		1,275,000,000				1,338,750,000
3 30 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi	7 Dok	675,000,000	APBD		7 Dok	708,750,000
3 30 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Laporan hasil koordinasi dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	11 Kab/Kota	12 Laporan	300,000,000	APBD		12 Laporan	315,000,000
3 30 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	9 Kab/Kota	1 Laporan	300,000,000	APBD		1 Laporan	315,000,000
3 30 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelaksanaan keuangan SKPD	1 Unit		9,150,000,000				9,607,500,000
3 30 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN OPD	Provinsi	51 orang	9,000,000,000	APBD		51 orang	9,450,000,000
3 30 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan OPD	Provinsi	12 orang	150,000,000	APBD		12 orang	157,500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kapasitas ASN	55 orang		375,000,000				393,750,000
3	30	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan pakian olahraga hari-hari tertentu	Provinsi	2 Jenis	75,000,000	APBD		2 Jenis	78,750,000
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat tugas dan fungsi	Luar Daerah	5 Orang	100,000,000	APBD		5 Orang	105,000,000
3	240	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	Provinsi	55 Orang	100,000,000	APBD		55 Orang	105,000,000
3	270	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Provinsi	5 orang	100,000,000	APBD		5 orang	105,000,000
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat jasa layanan untuk memperlancar tugas-tugas Perkantoran	7 jenis		1,190,000,000				1,249,500,000
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen penerangan bangunan kantor yang disediakan	Provinsi	1 Paket	50,000,000	APBD		1 Paket	52,500,000
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Provinsi	1 Paket	400,000,000	APBD		1 Paket	420,000,000
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi	1 Paket	80,000,000	APBD		1 Paket	84,000,000
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi	3 Dokumen	10,000,000	APBD		3 Dokumen	10,500,000
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Provinsi	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	105,000,000
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah, Kab/Kota	15 Laporan	400,000,000	APBD		15 Laporan	420,000,000
3	30	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi Dinas	Provinsi	6 Inovasi	150,000,000	APBD		6 Inovasi	157,500,000
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat aset dan sarana prasarana penunjang urusan perangkat daerah			2,465,000,000				2,488,250,000
3	30	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan jabatan	Provinsi	5 Unit	1,900,000,000	APBD		5 Unit	1,995,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 30 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional	Provinsi	4 Unit	115,000,000	APBD		4 Unit	120,750,000
3 30 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel	Provinsi	10 Unit	250,000,000	APBD		10 Unit	162,500,000
3 30 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	5 Unit	200,000,000	APBD		5 Unit	210,000,000
3 30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat jasa penunjang urusan perangkat daerah			1,745,000,000				1,832,250,000
3 30 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	21,000,000
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Provinsi	1 Laporan	650,000,000	APBD		1 Laporan	682,500,000
3 30 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	1 Laporan	75,000,000	APBD		1 Laporan	78,750,000
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Provinsi	1 Laporan	1,000,000,000	APBD		1 Laporan	1,050,000,000
3 30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah			1,700,000,000				1,785,000,000
3 30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi	8 Unit	200,000,000	APBD		8 Unit	210,000,000
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Provinsi	1 Unit	150,000,000	APBD		1 Unit	157,500,000
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor, Pasar Ole-ole, Bisnis Center dan Laboratorium BSMB	Provinsi	4 Jenis	950,000,000	APBD		4 Jenis	997,500,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	01	1.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Pemeliharaan Gedung Kantor, Gedung DEKANASDA	Provinsi	2 Unit	400,000,000	APBD		2 Unit	420,000,000
III.						Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis, dan Berbudaya Yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi dan Pariwisata				7,974,124,000				-
3	30	02				Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perizinan dan pendaftaran Perusahaan Bahan Berbahaya			150,000,000				-
3	30	02	1.03			Pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya, pengecer terdaftar	Tingkat pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar			150,000,000				-
3	30	02	1.03	02		Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya	Buru, Malra, Malteng, SBB,Aru, KKT , Buru	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1 Dokumen	157,500,000
3	30	04				Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat kestabilan harga dan stok			6,100,000,000				6,405,000,000
3	30	04	1.02			Pengendalian harga informasi, ketersediaan stok Bapak dan Bapakting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota yang terintegrasi dalam informasi perdagangan	Stabilisasi Harga dan Stok Bapak dan Bapakting			6,100,000,000				6,405,000,000
3	30	04	1.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring stok dan harga di tingkat pedagang dan Distributor	Kota Ambon	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	105,000,000
3	30	04	1.02	02		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah pelaksanaan monitoring stok dan harga, operasi pasar, koordinasi dalam rangka stabilisasi harga menjelang HBKN, Pasar Murah dan bantuan sarana perdagangan	Provinsi, Jawa Timur, Makassar, Jakarta, SBB, SBT, Malra, Aru, Ambon, Tual	6 Laporan	6,000,000,000	APBD		6 Laporan	6,300,000,000
3	30	05				Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Komoditi Ekspor dan Perluasan Pasar Ekspor			824,124,000				900,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota			824,124,000				900,000,000	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pameran produk ekspor, dan TEI, dan Pameran Luar Negeri	Luar Daerah	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	525,000,000
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekspor, Monitoring Pelaksanaan Ekspor Langsung, Pendampingan kepada Eksportir dan Calon Eksportir, Koordinasi Peningkatan Ekspor, dan Identifikasi Potensi Ekspor	Provinsi, Kota Ambon, Malteng, Malra, Tual, Aru	19 Eksportir	324,124,000	APBD		19 Eksportir	375,000,000
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap Barang Beredar dan			900,000,000				-
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Konsumen terhadap barang yang beredar dan tertib niaga sesuai ketentuan			400,000,000				-
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah BPSK	Ambon	1 Unit	400,000,000	APBD		1 Unit	425,000,000
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengawasan barang beredar/jasa			500,000,000				-
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah pengawasan barang beredar, pengawasan dan sosialisasi aplikasi berbasis anroid	Ambon, Malteng, SBB, SBT, Buru, Bursel, Aru, MTB, MBD, Tual dan Malra	12 Laporan	500,000,000	APBD		12 Laporan	525,000,000
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				20,110,837,944				21,175,000,000
					Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik				6,110,837,944				6,475,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian keuangan			6,110,837,944				6,475,000,000
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelaksanaan keuangan SKPD			6,110,837,944				6,475,000,000
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	12 Bulan	6,110,837,944	APBD		12 Bulan	6,475,000,000
II.					Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan				14,000,000,000				14,700,000,000
3	31	02			Perencanaan dan Pengembangan Industri	Pengembangan Perencanaan dan Pengembangan Industri			14,000,000,000				14,700,000,000
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pengembangan, pemberdayaan industri dan masyarakat			14,000,000,000				14,700,000,000
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah pengembangan kelapa terpadu,, Pengolahan Pangan Lokal	Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Bursel, Aru, MBD, SBB	7 Dokumen	2,000,000,000	APBD		7 Dokumen	2,100,000,000
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pengembangan DEKRANASDA, Pameran, (Inacraft, Maju Indonesia, Lokal),Oulet Bandara Pattimura, Pengembangan OVOP, Pelatihan Anyaman Bambu, Pelatihan Anyaman Daun Koli	Provinsi, Luar Daerah, SBB, dan MBD	8 Dokumen	4,500,000,000	APBD		8 Dokumen	4,725,000,000
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah bantuan peralatan industri	Ambon, Malteng, SBB, SBT, Buru, Bursel, Aru, MTB, MBD, Tual dan Malra	11 Dokumen	7,500,000,000	APBD		11 Dokumen	7,875,000,000
								JUMLAH	45,984,961,944				48,284,210,041

Formulir E.27

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Renstra Perangkat Daerah

Provinsi : Maluku

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√				
2	Penyiapan data dan informasi	√				
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√				
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi		√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√				
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√				
7	Perumusan isu-isu strategis	√				
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi		√			Menggunakan Visi dan Misi Gubernur dan Wagub Terpilih
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah					
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√				
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√				
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√				
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√				
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√				Lokasinya disesuaikan
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√				
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√				
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√				
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√				
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	√				
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	√				

Ambon, 18 Maret 2023

Kepala OPD

YAHYA KOTTA, S.Pt., M.Si
NIP. 196705271999031004

Formulir E.28**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan****Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi****Provinsi : Maluku**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	OPD Tidak merumuskan visi dan misi tetapi menggunakan visi dan misi pemerintah daerah yang merupakan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. OPD hanya menyesuaikan misi pemerintah daerah yang sesuai dengan TUPOKSI OPD
2	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan OPD merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah
3	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan rencana program, dan kegiatan OPD mengacu pada Kebijakan Umum dan Programa RPJMD
4	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Perumusan Indikator, sasaran, dan pendanaan OPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan pendanaan dalam RPJMD
5	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan Indikator Kinerja perangkat daerah baik indikator utama maupun indikator kunci OPD berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD
6	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	Pelaksanaan program OPD disesuaikan dengan pentahapan dalam RPJMD hanya lokasi yang disesuaikan

Formulir E.30**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan****Renja Perangkat Daerah Provinsi : Maluku**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan evaluasi
(1)	(2)	(3)
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup provinsi telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta mengacu pada RKP	Perumusan priritas dan sasaran RENJA Dinas Perindag Tahun 2024 mengacu pada priorotas dan sasaran dalam RENSTRA yang merupakan dokumen turunan dari RPJMD
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup provinsi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas dalam RENJA Dinas Perindag Tahun 2024 mengacu pada rencana program dan kegiatan dalam RPJMD